

Peran Mediasi Belanja Modal Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Transfer (DAU Dan DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB) Pada Kabupaten/Kota Di Koridor Jalan Tol Trans Sumatra

The Mediating Role Of Road And Bridge Infrastructure Capital Expenditure In The Relationship Between Regional Own-Source Revenue (PAD) And Intergovernmental Transfers (DAU And DAK) On Regional Economic Growth (GRDP) In Regencies/Cities Along The Trans-Sumatra Toll Road Corridor

Jilan Bahiروه Mumtaz^a, Suyatmin Waskito Adi^{b*}
Universitas Muhammadiyah Surakarta^{a,b}
^bsuy182@ums.ac.id*

Abstract

This study aims to analyze the mediating role of road and bridge infrastructure capital expenditure in the relationship between Regional Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on regional economic growth (GRDP) in regencies/cities along the Trans-Sumatra Toll Road corridor during 2018–2023. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and Statistics Indonesia. The sample was selected using purposive sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression extended into path analysis to examine both direct and indirect effects among variables, with hypothesis testing at a 5% significance level. The results indicate that PAD and DAU have a positive and significant effect on capital expenditure, while DAK has no significant effect. On GRDP, PAD and DAK have a positive and significant effect, whereas DAU and capital expenditure show no significant effect. Furthermore, capital expenditure is not able to mediate the relationship between PAD, DAU, and DAK on GRDP.

Keywords: Capital Expenditure; DAK; DAU; GRDP; PAD.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) pada kabupaten/kota di wilayah koridor Jalan Tol Trans Sumatra periode 2018–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda yang dikembangkan dalam analisis jalur untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel, dengan pengujian hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan. Terhadap PDRB, PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan, sementara DAU dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, belanja modal tidak mampu memediasi hubungan antara PAD, DAU, dan DAK terhadap PDRB.

Kata Kunci: Belanja Modal; DAU; DAK; PAD; PDRB.

1. Pendahuluan

Di Indonesia mulai tahun 2001, kebijakan otonomi daerah telah mengubah sistem pemerintah dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi fiskal dapat dipahami sebagai sebuah proses pengalihan wewenang dan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Asli et al., 2021). Pemerintah Indonesia dalam menerapkan desentralisasi didorong dengan momentum reformasi pasca-krisis mulai berlaku sejak tahun 1997-1998. Secara resmi, struktur

desentralisasi mulai diberlakukan efektif pada 1 Januari 2002, ditandai dengan penetapan regulasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik. Landasan hukum utama bagi penerapan otonomi daerah serta desentralisasi keuangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Nurhemi & R, 2015). Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat dikenali melalui kekuasaan daerah dalam memperbesar pemasukan dari retribusi dan pajak lokal, serta pengelolaan asset terpisah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menerima alokasi dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD) sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah tersebut, tujuan utama dari desentralisasi fiskal menggunakan PAD dan TKD adalah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (Aditya et al., 2024).

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan (DAU dan DAK) dan disamping dana tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatannya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pujiati, 2018). Keberhasilan desentralisasi dievaluasi berdasarkan sejauh mana suatu daerah dapat meraih kemandirian dalam urusan keuangan, yang terlihat dari persentase PAD yang signifikan dibandingkan dengan total pendapatan.

Prinsip otonomi daerah, yang merupakan manifestasi dari desentralisasi memberikan deskripsi manajerial yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan urusan publik dan alokasi sumberdaya fiskal secara mandiri. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan ini seringkali dihadapkan pada anomali fiskal, yakni tingginya ketergantungan daerah terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Secara empiris, kondisi ini terefleksi di sejumlah wilayah, termasuk di Sumatra, di mana kinerja keuangan Pemerintah Daerah dinilai suboptimal yang secara spesifik diindikasikan oleh rasio kemandirian fiskal yang cenderung rendah (Sumatra et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemandirian daerah melalui penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan keberhasilan otonomi daerah dalam mengali potensi-potensi daerahnya dan apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerahnya (Terindeks et al., 2021).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah komponen pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), secara spesifik dialokasikan untuk memfasilitasi pemerataan kapasitas fiskal antar-Daerah. Tujuannya adalah untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah dalam konteks implementasi desentralisasi. Secara regulasi, alokasi DAU ditetapkan minimum sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDNN) yang telah dianggarkan dalam APBN. Karakteristik utama DAU adalah sebagai block grant, yang mengimplementasikan otonomi penuh bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas dan penggunaannya. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) didefinisikan sebagai instrument transfer fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara spesifik dialokasikan untuk daerah tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan pendanaan bagi kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Sasaran utama DAK adalah mengurangi beban fiskal yang ditanggung oleh pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan, pemanfaatan DAK secara eksplisit diarahkan pada aktivitas investasi, meliputi pembangunan, pengadaan. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik yang memiliki usia ekonomis Panjang (Asli et al., 2021).

Penyaluran Dana Transfer dari pemerintah pusat merupakan mekanisme intervensi fiskal yang ditujukan untuk memitigasi disparitas fiskal horizontal antara daerah serta menjamin kesiapan fiskal yang memadai bagi setiap entitas daerah dalam mengimplementasikan otonomi. Meskipun demikian, dalam rentang waktu tertentu Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi struktur pendapatan daerah, dengan proporsi yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan sumber pendapatan lainnya, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih menjadi fenomena struktural dalam kerangka hubungan keuangan pusat ke daerah.

Pembangunan ekonomi regional PDRB secara fundamental di dorong dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai pada suatu daerah, (Pembangunan et al., 2021). Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara fundamental mengamanatkan terwujudnya masyarakat yang adil dan Makmur. Dalam rangka merealisasikan mandat konstitusional tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional yang terstruktur, yang secara empiris memiliki peran instrumental dalam memacu pertumbuhan ekonomi baik ditingkat nasional maupun regional. Secara spesifik, pengembangan jaringan strategis seperti jalan tol merupakan bagian integral dari investasi infrastruktur yang memiliki kapabilitas untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, sehingga berkontribusi langsung pada pencapaian kemakmuran Indonesia.

Dalam upaya merealisasikan mandat konstitusional salah satu yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra yang dibangun dalam rangka mendukung perekonomian nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang pedoman Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra dengan menugaskan PT. Hutama Karya (Perseroan) untuk melaksanakan Pembangunan Jalan Tol tersebut, dan pembangunan ini termasuk Proyek Strategis Nasional (Saputra, 2024). Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra secara strategis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan jasa serta pergerakan penduduk dipulau Sumatra. Investasi infrastruktur ini dirancang sebagai katalisator untuk menggerakkan perekonomian regional pada kabupaten/kota yang berada di koridor layanan tol.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa “belanja daerah adalah sebuah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan”. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja modal mengacu pada pengeluaran pemerintah daerah untuk pengadaan asset tetap guna menghasilkan manfaat ekonomi jangka Panjang, dengan meningkatkan investasi dalam belanja modal pemerintah

daerah diharapkan dapat memperkuat kemampuan layanan dan dorongan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah (Meriana & Subagio, 2025). Belanja modal infrastruktur merupakan instrumen strategis yang krusial dalam portofolio belanja daerah. Jenis pengeluaran ini secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan public karena menghasilkan efek penggandaan ekonomi (multiplier effect) yang signifikan dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang bersifat jangka Panjang. Kontras dengan belanja operasional (belanja pegawai), belanja modal cenderung lebih efektif dalam menstimulus pertumbuhan dan pembangunan daerah, menjadikan prioritas dalam kerangka desentralisasi fiskal (Aditya et al., 2024). Infrastruktur dalam penelitian ini terkait infrastruktur jalan dan jembatan, yang dimana merupakan sarana transformasi yang berguna dalam mendukung pembangunan ekonomi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap PDRB, namun Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif (Devi et al., 2024). Studi terdahulu juga sudah mengidentifikasi bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau kota Provinsi Banten, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah (Terhadap & Ekonomi, 2024). Pada penelitian Pad et al., (2015), hasil pengujian path analysis bahwa Belanja Modal dapat menjadi variabel mediasi antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan penelitian Provinsi et al., (2021) , bahwa Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, yang berpengaruh positif hanya Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa PAD, Dana transfer dan Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian Uhise et al., (2012), pengaruh DAU secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara adalah bersifat negative, sehingga belanja modal tidak dapat berfungsi secara variabel intervening antara DAU dan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokrasi. Desentralisasi dapat di definisikan sebagai proses di mana entitas administratif perantara dan lokal menerima sumber daya, wewenang, tanggung jawab , dan kekuasaan dari pemerintah federal (Informasi et al., 2024). Tujuan dari ini adalah untuk mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan mendorong aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, dapat mencapai pemerataan keuangan di setiap wilayah sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom (Pendidikan, 2024). Bentuk aplikasi desentralisasi adalah hak mandiri, kekuasaan dan tanggung jawab menjadi milik daerah tersebut, baik dalam pelaksanaan kebijakan, perencanaan, maupun pembiayaan. Dengan adanya desentralisasi, maka daerah memiliki kekuasaan total terhadap pengelolaan pemerintahan yang mereka jalankan (Pad et al., 2015).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori Pertumbuhan Endogen, yang juga dikenal dengan istilah lebih sederhana sebagai Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*). Teori ini berusaha untuk

mengulas bahwa faktor-faktor pertumbuhan mencakup pengembangan akumulasi modal secara luas. Dalam konteks ini, artian modal tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga elemen non-fisik berupa pengetahuan dan teknologi (Pad et al., 2015). Pada Teori pertumbuhan ekonomi endogen menegaskan bahwa perkembangan ekonomi berasal dari elemen-elemen internal seperti kebijakan pemerintah dan investasi yang berjangka Panjang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2024), mengindikasikan bahwa teori pertumbuhan endogen tetap memiliki relevansi di kawasan Sumatra, di mana elemen internal memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi. Hal ini memperkuat bahwa pengeluaran modal untuk infrastruktur sebagai elemen internal berpeluang besar untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tepat dijelaskan melalui paradigma pertumbuhan endogen, di mana peran kebijakan dan akumulasi modal domestik menjadi determinan utama pertumbuhan. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa belanja modal infrastruktur sebagai investasi publik berpotensi mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Paper, 2018).

Teori *Path Analysis*

Path analysis merupakan metode untuk menganalisis hubungan sebab akibat dalam regresi ganda, di mana variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung (Uchse et al., 2012). Metode ini diperkenalkan oleh Wright pada tahun 1934 sebagai pengembangan analisis hubungan kausal dengan cara menguraikan variabel penyebab serta menginterpretasikan dampak yang ditimbulkannya. Path analysis didasarkan pada asumsi bahwa variabel-variabel yang diteliti saling berkaitan dan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berdiri sendiri, sehingga memungkinkan peneliti menguji hubungan kausal tanpa perlu memanipulasi variabel penelitian (Teologi & Agama, 2025). Dalam konteks mediasi, model ini mengasumsikan bahwa variabel endogen (Y) dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel eksogen (X), di mana salah satu variabel tersebut berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. PAD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem desentralisasi. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, PAD terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pendidikan, 2024). Selain itu, PAD merupakan pendapatan yang dianggarkan dalam APBD dengan dasar hukum yang jelas dan memiliki tingkat kepastian yang dapat diukur secara rasional (Kota et al., 2019).

Selain PAD, sumber pendanaan daerah juga berasal dari dana transfer yang merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dana transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan dana yang dialokasikan untuk pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah guna mendukung kebutuhan pelaksanaan desentralisasi (Rosadian, 2020). Sementara itu, DAK diberikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, guna mempercepat pembangunan daerah (Informasi et al., 2024).

Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Pad et al., 2015). Belanja modal meliputi beberapa kategori, seperti belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja fisik lainnya. Pengelolaan belanja modal yang efektif sangat diperlukan karena berperan sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik dalam menghadapi tantangan desentralisasi fiskal (Putri, 2024).

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai yang ditambah dari barang dan jasa yang dihasilkan melalui semua aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Perhitungan PDRB dapat dilakukan berdasarkan harga yang berlaku dan harga konstan. PDRB berdasarkan harga yang berlaku merupakan total nilai yang ditambah dari barang dan jasa yang dihitung pula menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang relevan, sedangkan PDRB dengan harga konstan dihitung memakai harga dari tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi juga berfungsi sebagai indikator kuantitatif yang mencerminkan perkembangan suatu ekonomi dalam periode tertentu ketika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Pad et al., 2015).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja modal

Pendapatan Asli Daerah adalah tolak ukur utama dari kapasitas keuangan suatu daerah yang berasal dari potensi ekonomi setempat, di antaranya pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas dalam anggaran pembangunan. Dalam kerangka otonomi daerah, PAD memberikan keluwesan bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran modal yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tanpa terlalu bergantung pada dana yang ditransfer dari pemerintah pusat.

Menurut penelitian Susanto et al., (2025) dan Prayoga & Pratama, (2025), menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Manik et al., (2025), menyatakan bahwa PAD berfungsi sebagai indikator utama kapasitas fiskal daerah yang mampu mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal

Dana Alokasi Umum adalah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan tujuan mengurangi perbedaan dalam kapasitas keuangan

antardaerah serta meningkatkan kemampuan finansial daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintah dan pembangunan. Sesuai dengan teori desentralisasi fiskal, DAU berfungsi sebagai alat utama dalam mendukung pendanaan untuk pengeluaran daerah, termasuk pengeluaran untuk investasi. Meskipun DAU berbentuk hibah blok dan penggunaan dana ini cukup fleksibel, pemerintah daerah sering kali memanfaatkan DAU untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur dasar sebagai Langkah untuk meningkatkan pelayanan public dan mendorong perekonomian.

Menurut penelitian Kota et al., (2019) dan Unud, (2018), menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten Bali, memberikan penjelasan bahwa DAU memiliki keterikatan dengan pembangunan infrastruktur daerah, karna bantuan berupa DAU dikirimkan dari nasional dan dipergunakan pemda untuk mendanai program pemerintah. Anandyaswara, (2024), dalam hal pengalokasian belanja modal tidak terlepas dari DAU, hal ini karena tujuan dari DAU adalah untuk peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja modal

Dana Alokasi Khusus adalah sumber dana yang memiliki sifat khusus dan ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas yang ditetapkan secara nasional, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan DAU, DAK secara langsung dituju untuk menutupi biaya modal, termasuk pembangunan serta peningkatan mutu jalandan jembatan di wilayah tertentu. karenanya, secara konseptual DAK sangat terkait erat dengan pengeluaran modal untuk infrastruktur.

Menurut penelitian Pramudya & Abdullah, (2021) dan Pendapatan et al., (2021), menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pelealu et al., (2012), menyatakan bahwa DAK merupakan anggaran yang memiliki kontribusi besar terhadap belanja modal Kota Manado. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Belanja Modal untuk infrastruktur jalan dan jembatan adalah jenis investasi public yang memiliki posisi penting dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi didaerah. Infrastruktur transportasi yang baik dapat meningkatkan hubungan antar wilayah, memperlancar pengiriman barang dan jasa, menurunkan biaya distribusi, serta menambah efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi endogen, investasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk infrastruktur public dianggap sebagai elemen internal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut penelitian Empiris et al., (2021), Savira et al., (2020) dan Handayani et al., (2017), menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal yang dilakukan pemerintah dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₄: Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Pendapatan Asli Daerah tidak hanya menunjukkan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan sejauh mana kegiatan ekonomi berlangsung di area tersenut. Wilayah yang memiliki PAD tinggi biasanya menunjukkan fondasi ekonomi yang kokoh, peluang investasi yang baik, dan kegiatan ekonomi yang lebih hidup. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan PAD untuk mendukung proyek pembangunan dan pelayanan public yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian Utomo et al., (2015), Rajab, (2023) dan Adhim et al., (2024), menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pendapatan daerah yang diperuntukkan pada komponen model akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan PDRB. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₅: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB)

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Dana transfer dari pemerintah pusat, baik melalui DAU maupun DAK, berfungsi sebagai pendorong keuangan bagi ekonomi local. Melalui dana transfer, pemerintah daerah mendapatkan tambahan dana untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan public. Meskipun pengaruh dari transfer dana terhadap pertumbuhan ekonomi sering kali tergantung pada cara pengelolaannya, berbagai studi menunjukkan bahwa DAU dan DAK berperan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi daerah. Dengan demikian, DAU dan DAK diduga berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Menurut penelitian Sinaga et al., (2020), Murti et al., (2023) dan Bruto et al., (2018) menyatakan bahwa DAU dan DAK berpengaruh positif pertumbuhan ekonomi regional. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₆: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB) yang dimediasi oleh Belanja Modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbesar pengeluaran modal pada infrastruktur yang berdampak produktif. Pengembangan jalan dan jembatan yang dihasilkan dari pengeluaran modal tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga, pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan pengeluaran modal infrastruktur. Dengan demikian, pengeluaran modal untuk infrastruktur jalan dan jembatan diduga memediasi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi regional.

Menurut penelitian Ghiffari & Ariani, (2022) dan Utomo et al., (2015), menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan dimediasi oleh belanja modal. Pad et al., (2015), adanya kebijakan otonomi daerah bertujuan agar setiap daerah mampu memaksimalkan potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penyusunan

APBD pemerintah daerah akan mengalokasikan Belanja Modal disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₇: Belanja Modal memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB)

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB) yang dimediasi oleh Belanja Modal

Dana Alokasi Umum memperkuat kapasitas keuangan daerah sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menambah belanja infrastruktur. Infrastruktur yang dikembangkan melalui belanja modal tersebut memiliki kemungkinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi dan konektivitas antar daerah. Dengan demikian, diduga bahwa dampak DAU terhadap pertumbuhan ekonomi regional tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui peran belanja modal infrastruktur sebagai variabel penentu.

Menurut penelitian Maheni et al., (2021) dan D. I. Provinsi & Selatan, (2017), menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan dimediasi oleh belanja modal. Chandra & Badrudin, (2024), menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan dimediasi oleh belanja modal, GAF dalam belanja modal harus lebih banyak digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan atau peningkatan infrastruktur pendukung. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₈: Belanja Modal memediasi hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB)

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB) yang dimediasi oleh Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus yang ditujukan secara langsung untuk pengembangan infrastruktur diharapkan dapat memperbesar belanja modal yang produktif di wilayah. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dengan menggunakan DAK memiliki kemungkinan untuk turut mendorong perkembangan ekonomi melalui akses dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, belanja modal untuk infrastruktur jalan dan jembatan diduga memediasi hubungan antara DAK dan pertumbuhan ekonomi regional.

Menurut penelitian yudha et al., (2020), Utomo et al., (2015), Pertumbuhan et al., (2018), menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan dimediasi oleh belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₉: Belanja Modal memediasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB)

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen, dengan tujuan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) melalui Belanja Modal sebagai variabel mediasi pada kabupaten/kota di wilayah Koridor Jalan Tol Trans Sumatra periode 2018–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran APBD yang dipublikasikan

oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta data PDRB dari Badan Pusat Statistik. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling pada beberapa kabupaten/kota yang memenuhi kriteria penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PDRB, variabel independen terdiri dari PAD, DAU, dan DAK, serta variabel mediasi adalah Belanja Modal yang mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur. Seluruh variabel ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk meningkatkan kualitas data. Metode analisis yang digunakan meliputi statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda yang dikembangkan dalam analisis jalur untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) pada tingkat signifikansi 5%, dilengkapi dengan koefisien determinasi untuk menilai kemampuan model serta uji mediasi untuk menguji peran Belanja Modal sebagai variabel perantara (Ghozali, 2021).

4. Hasil Dan Pembahasan

Definisi Objek Penelitian

Pembangunan infrastruktur merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan konektivitas dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan mendorong aktivitas ekonomi lokal di sepanjang koridor tol. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk, memperlancar kegiatan ekonomi, serta mendorong pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan secara lebih optimal. Penelitian ini berfokus pada 12 kabupaten/kota di wilayah koridor Jalan Tol Trans Sumatra dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah dan publikasi statistik resmi selama periode 2018–2023. Data tersebut dianalisis menggunakan metode statistik dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data, sehingga diperoleh total 72 observasi untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian.

Tabel 1. Daftar Sampel Kabupaten/Kota

No.	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Lampung Selatan
2	Kabupaten Lampung Timur
3	Kota Bandar Lampung
4	Kota Palembang
5	Kabupaten Banyuasin
6	Kabupaten Ogan Komering Ilir
7	Kota Pekanbaru
8	Kabupaten Kampar
9	Kota Dumai
10	Kota Medan
11	Kabupaten Deli Serdang
12	Kota Binjai

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memeberikan ringkasan variabel-variabel tersebut, seperti yang ditunjukkan pada table dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD_Realisasi	72	91990000000.00 000000	2239620000000. 00000000	578778055555.5 557000000	523413937840.54 266000000
DAU_Realisasi	72	424090000000.0 0000000	1690980000000. 00000000	989855138888.8 888000000	321831478528.45 500000000
DAK_Realisasi	72	4910000000.000 000000	641580000000.0 00000000	340233029166.6 6660000000	131105000656.71 2020000000
Belanja_Modal_Jalan_ Jembatan	72	102220000000.0 0000000	1617540000000. 00000000	460362638888.8 888000000	295248182014.85 860000000
PDRB_ADHK	72	7709000000000. 00000000	1734460000000 00.00000000	5357815277777 7.7700000000	42370491872096. 23000000000
Valid N (listwise)	72				

Sumber : data diolah, 2026

Berdasarkan statistik deskriptif, PAD memiliki nilai minimum sebesar Rp91.990.000.000 (Kota Binjai, 2021) dan maksimum Rp2.239.620.000.000 (Kota Medan, 2023) dengan rata-rata Rp578.778.055.555 dan standar deviasi Rp523.413.937.840. DAU memiliki nilai minimum Rp424.090.000.000 (Kota Dumai, 2020) dan maksimum Rp1.690.980.000.000 (Kota Medan, 2019) dengan rata-rata Rp989.855.138.888 dan standar deviasi Rp321.831.478.528. DAK menunjukkan nilai minimum Rp4.910.000.000 (Kota Bandar Lampung, 2018) dan maksimum Rp641.580.000.000 (Kabupaten Deli Serdang, 2022) dengan rata-rata Rp340.233.029.166 dan standar deviasi Rp131.105.000.656. Belanja modal memiliki nilai minimum Rp102.220.000.000 (Kota Binjai, 2020) dan maksimum Rp1.617.540.000.000 (Kota Medan, 2022) dengan rata-rata Rp460.362.638.888 dan standar deviasi Rp295.248.182.014. Sementara itu, PDRB memiliki nilai minimum Rp7.709.000.000.000 (Kota Binjai, 2018) dan maksimum Rp173.446.000.000.000 (Kota Medan, 2023) dengan rata-rata Rp53.578.152.777.777 dan standar deviasi Rp42.370.491.872.096.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada kedua persamaan masing-masing sebesar 0,200 dan 0,198, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual pada model regresi telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Selain itu, hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh berada dalam rentang -2 hingga +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada kedua model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, secara keseluruhan model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pola hubungan lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat (Danang : 2012). Pengujian dilakukan menggunakan dua persamaan model regresi untuk menguji seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.320	3.452		-.093	.926
LN_PAD	.353	.062	.513	5.665	.000
LN_DAU	.527	.166	.317	3.168	.002
LN_DAK	.115	.077	.125	1.499	.138

Sumber : data diolah, 2026

$$LN_BM = -00,420 + 0,353X1 + 0,527X2 + 0,115X3 + e$$

Setiap kenaikan 1% PAD meningkatkan belanja modal sebesar 0,353%, DAU 0,527%. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal infrastruktur di wilayah penelitian

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.256	3.008		-.418	.678
LN_PAD	.683	.066	.744	10.372	.000
LN_DAU	.289	.155	.130	1.862	.067
LN_DAK	.156	.068	.127	2.305	.024
LN_Belanja_Modal	.083	.106	.062	.785	.435

Sumber : data diolah, 2026

$$LN_PDRB = 3,134 + 0,683X1 + 0,289X2 + 0,156X3 + 0,083Z + e$$

PAD memiliki pengaruh paling kuat terhadap PDRB. DAU dan DAK berpengaruh positif namun Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB setelah mengontrol variabel pendapatan daerah

Hasil Uji Simultan F

Tabel 5. Hasil Uji Simultan F Persamaan 1

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15.918	3	5.306	39.514	.000b
Residual	9.131	68	.134		
Total	25.050	71			

Sumber : data diolah, 2026

Hasil uji F pada persamaan 1 menunjukkan *p-value* sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota wilayah koridor jalan tol sumatra.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan F Persamaan 2

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.778	4	9.444	92.633	.000b
	Residual	6.831	67	.102		
	Total	44.609	71			

Sumber : data diolah, 2026

Hasil uji F pada persamaan 2 juga menunjukkan *p-value* sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal secara bersama-sama memiliki pengaruh dan signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota wilayah koridor jalan tol sumatra.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial t

Tabel 7. Hasil Uji Parsial t Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.320	3.452		-.093	.926
LN_PAD	.353	.062	.513	5.665	.000
LN_DAU	.527	.166	.317	3.168	.002
LN_DAK	.115	.077	.125	1.499	.138

Sumber : data diolah, 2026

Mengidentifikasi bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai masing-masing sebesar 0,000 dan 0,002, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Sebaliknya, dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, mengingat $0,138 > 0,05$.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial t Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.256	3.008		-.418	.678
LN_PAD	.683	.066	.744	10.372	.000
LN_DAU	.289	.155	.130	1.862	.067
LN_DAK	.156	.068	.127	2.305	.024
LN_Belanja_Modal	.083	.106	.062	.785	.435

Sumber : data diolah, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan nilai masing-masing sebesar 0,000 dan 0,024, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Sebaliknya, dana alokasi umum dan belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB, mengingat masing-masing sebesar 0,067 dan 0,435 yang melebihi ambang batas 0,05.

Uji Koefisien Determinan *Adjusted R²*

Tabel 8. Hasil Uji *Adjusted R²*

Model	R Square	Adjusted R Square
Persamaan 1	.635	.619
Persamaan 2	.847	.838

Sumber : data diolah, 2026

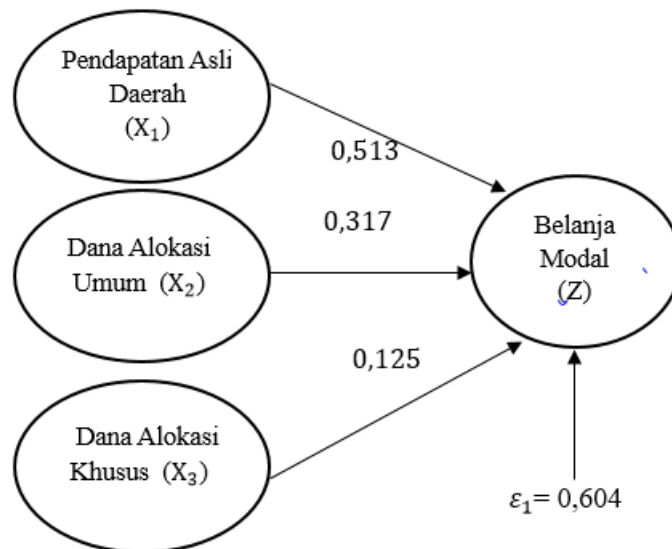
Nilai *Adjusted R Square* untuk persamaan 1, sebesar 0,619 menunjukkan bahwa (PAD,DAU dan DAK) mampu menjelaskan 61,9% variabel pada Belanja Modal Kabupaten/kota di wilayah koridor tol Sumatra. Sisanya sebesar 38,1% dipengaruhi oleh factor lain di luar model penelitian.

Sementara, nilai *Adjusted R Square* untuk persamaan 2, sebesar 0,838 menunjukkan bahwa (PAD,DAU, DAK dan Belanja Modal) mampu menjelaskan 83,8% variabel pada PDRB Kabupaten/kota di wilayah koridor tol Sumatra. Sisanya sebesar 16,2% dipengaruhi oleh factor lain di luar model penelitian.

Uji Analisis Jalur

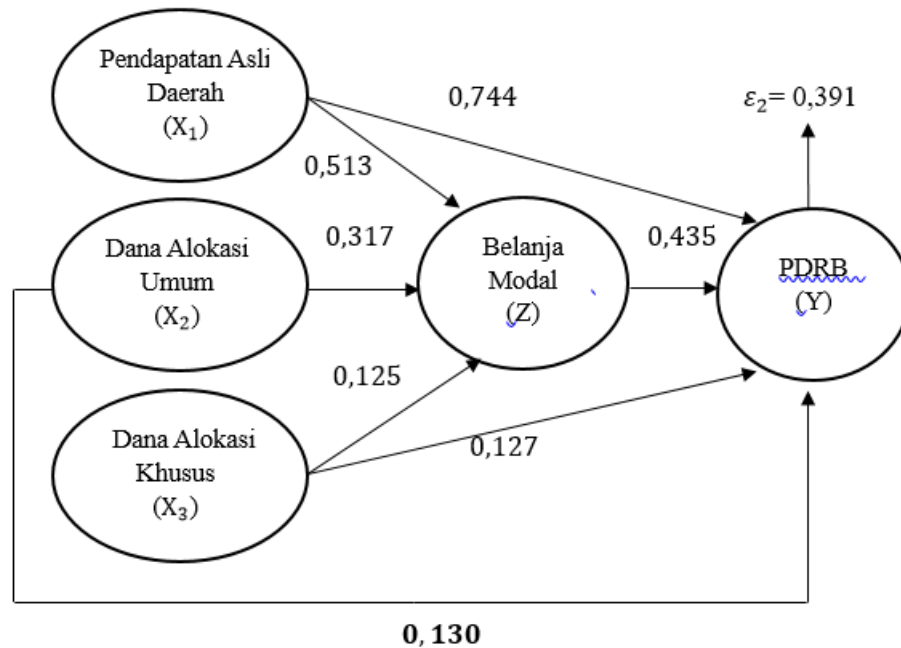
Analisis jalur adalah suatu bentuk lanjutan dari regresi berganda. Metode ini melibatkan lebih dari dua variabel yang memiliki keterkaitan rumit. Sasaran utamanya adalah untuk mengeksplorasi hubungan struktural antara variabel yang berasal dari luar dan variabel yang terpengaruh, serta untuk menilai dampak langsung, tidak langsung dan keseluruhan dari model yang dirancang dalam studi yang dilakukan.

Analisis Persamaan 1



Gambar 1. Hasil analisis jalur

Analisis Persamaan 2



Gambar 2. Hasil analisis jalur

Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh langsung XI-Y = 0,744

Pengaruh tidak langsung XI-Y = $0,513 \times 0,435 = 0,223155$

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung. Sehingga , belanja modal tidak mampu memediasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto pada wilayah kabupaten/kota sekitar tol Sumatra.

Dana Alokasi Umum

Pengaruh langsung X2-Y = 0,130

Pengaruh tidak langsung X2-Y = $0,317 \times 0,435 = 0,137895$

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung. Sehingga , belanja modal mampu memediasi Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto pada wilayah kabupaten/kota sekitar tol Sumatra. Namun, secara statistic pengaruh tersebut tidak signifikan dikarenakan hubungan belanja modal terhadap PDRB tidak signifikan serta didukung oleh hasil uji sobel.

Dana Alokasi Khusus

Pengaruh langsung X2-Y = 0,127

Pengaruh tidak langsung X2-Y = $0,125 \times 0,435 = 0,054375$

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung. Sehingga , belanja modal tidak mampu memediasi Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto pada wilayah kabupaten/kota sekitar jalan tol Sumatra.

Uji Sobel

Tabel 9. Hasil Uji Sobel

Jalur Mediasi	Z Sobel	Kriteria (1,96)	Keputusan
PAD-BM-PDRB	0,58345	1,96	Tidak Signifikan
DAU-BM-PDRB	0,55926	1,96	Tidak Signifikan
DAK-BM-PDRB	0,550277	1,96	Tidak Signifikan

Sumber : data diolah, 2026

Berdasarkan uji sobel Belanja Modal tidak terbukti memediasi hubungan antara PAD,DAU dan DAK terhadap PDRB diwilayah koridor jalan tol trans Sumatra. Efek sebagian besar bersifat langsung, terutama melalui PAD.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk belanja modal oleh pemerintah daerah. PAD berfungsi sebagai tolak ukur mandiri dalam bidang fiscal, memberikan kekuasaan bagi daerah untuk mengatur prioritas dalam pembangunan, terutama di sector infrastruktur.

Hasil ini konsisten dengan prinsip desentralisasi fiscal yang berargumen bahwa peningkatan kemampuan keuangan suatu daerah akan mempengaruhi kemampuan dalam hal pembiayaan untuk pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanto et al., (2025) serta Lawalata (2022), yang mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif terhadap pengeluaran modal. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan belanja infrastruktur di daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ yang memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan. DAU yang sifatnya sebagai block grant memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk mendistribusikan dana tersebut ke berbagai sector, termasuk pengeluaran untuk investasi.

DAU dirancang untuk menjadi alat yang meratakan distribusi fiscal di antara daerah-daerah. Namun, dalam implementasinya, DAU juga dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanto et al., (2025) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan mencerminkan ketergantungan fiscal daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan $0,138 > 0,05$ yang tidak memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK belum berhasil secara signifikan meningkatkan pengeluaran modal. Hal ini disebabkan oleh batasan dalam realisasi anggaran, kurang tepatnya sasaran program, serta masalah dalam pelaksanaan di tingkat daerah. DAK berfungsi sebagai alat fiscal untuk mendukung pendanaan program prioritas nasional di daerah, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur fisik. Namun dalam praktiknya, keberhasilan DAK sangat tergantung pada cara pengelolaan dan pelaksanaannya,

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Novianti et al., (2020) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun, terdapat penelitian milik Pratiwi et al., (2017), yang menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, efektivitas DAK bergantung pada implementasi di daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap PDR. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan $0,435 > 0,05$ yang tidak memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal belum mampu menghasilkan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktornya adalah *time lag*, di mana pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu sebelum mempengaruhi aktivitas ekonomi. Seberapa efektif belanja modal sangat ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan dan ketepatan dalam pengeluaran anggaran. Jika belanja modal tidak diarahkan pada sector-sektor yang produktif atau tidak sesuai dengan keperluan ekonomi di daerah, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun belanja modal meningkat dalam jumlah, belum tentu disertai dengan perbaikan kualitas hasil ekonomi yang dihasilkan

Belanja modal adalah jenis investasi pemerintah yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak semua belanja modal memberikan *multiplier effect* yang berarti bagi perekonomian daerah. Diakibatkan oleh rendahnya pemanfaatan infrastruktur, minimnya koneksi antar proyek pembangunan dan sector ekonomi yang unggul, serta terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Handayani et al., (2017) dan Risman et al., (2022), yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Namun, terdapat penelitian milik Novianti et al., (2020), yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak belanja modal tidak selalu signifikan dalam jangka pendek.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap PDR. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak paling signifikan terhadap perkembangan ekonomi. PAD menggambarkan potensi ekonomi suatu daerah dalam memperoleh pendapatan dari sumber local.

Peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk mendanai pembangunan serta memberikan layanan public yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Utomo et al., (2015), Rajab (2023) dan Adhim et al., (2024) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap PDR. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan $0,067 > 0,05$ yang tidak memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis ditolak. Namun, DAK menunjukkan berpengaruh terhadap PDRB dengan nilai signifikan $0,024 < 0,05$ yang memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis diterima.

Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua jenis dana transfer memberikan efek yang serupa terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK yang bersifat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding DAU. Tidak adanya pengaruh signifikan dari DAU terhadap PDRB menunjukkan bahwa distribusi DAU belum berfungsi untuk mendorong aktivitas ekonomi secara langsung, dikarenakan Sebagian besar DAU digunakan untuk mendanai pengeluaran tetap, seperti gaji pegawai dan biaya operasional pemerintah, sehingga perannya dalam sector produktif menjadi terbatas. Selain itu, karakteristik DAU yang bersifat *block grant* memungkinkan penggunaannya tidak sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ekonomi, sehingga efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal.

Dana transfer dirancang untuk meningkatkan kapasitas pembangunan daerah serta mengurangi ketimpangan anatar wilayah. Namun, efektivitas dana transfer bergantung pada pola alokasi dan penggunaannya oleh pemerintah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sinaga et al., (2020) dan Murti et al., (2023) yang menyatakan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Namun, terhadap penelitian milik Ardiyanti & Jokolelono, (2016), yang menunjukkan bahwa DAU tidak selalu berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peran Belanja Modal dalam memediasi PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji sobel, menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu memediasi hubungan antara PAD terhadap PDRB dengan nilai Z sebesar $0,58345 < 1,96$ dan nilai pengaruh tidak langsung sebesar $0,223155$ lebih kecil dibanding pengaruh langsung $0,744$, sehingga menunjukkan bahwa PAD lebih dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

PAD mencerminkan sejauh mana daerah memiliki kemandirian fiscal, semakin tinggi PAD semakin besar pula kemampuan daerah untuk menentukan prioritas pengeluarannya. Namun, dalam praktiknya, kenaikan PAD tidak selalu sejalan dengan perbaikan dalam kualitas pengeluaran untuk pembangunan.

Belanja modal seharusnya menjadi perantara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian ini, hal tersebut tidak terjadi. Hal ini bisa disebabkan karena alokasi PAD lebih banyak digunakan untuk belanja operasional serta adanya *time lag* dalam dampak pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, meskipun daerah memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar, belum tentu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi public.

Selain itu, dalam struktur keuangan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih bergantung pada sumber-sumber tertentu seperti pajak daerah dan retribusi belum sepenuhnya mencerminkan aktivitas ekonomi yang efisien. Dalam beberapa kondisi, peningkatan PAD lebih banyak didorong oleh optimalisasi pemungutan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan sektor riil. Kondisi tersebut menyebabkan PAD tidak secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan investasi maupun output ekonomi daerah. Oleh karena itu, meskipun PAD mengalami peningkatan, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal menjadi kurang signifikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdillah (2015) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang dimediasi oleh belanja modal.

Peran Belanja Modal dalam memediasi DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji sobel, menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu memediasi hubungan antara DAU terhadap PDRB dengan nilai Z sebesar $0,55926 < 1,96$ walaupun nilai pengaruh tidak langsung sebesar $0,137895$ lebih besar dibanding pengaruh langsung $0,130$, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Dikarenakan hubungan belanja modal terhadap PDRB tidak signifikan serta didukung oleh uji sobel.

Kegagalan dalam mediasi ini menunjukkan bahwa cara pengalihan DAU ke pertumbuhan ekonomi tidak terlaksana melalui investasi publik, melainkan lebih dominan lewat jalur konsumsi oleh pemerintah. DAU yang bersifat *block grant* memberikan keleluasaan yang tinggi bagi pemerintah daerah, tetapi dalam penerapannya cenderung digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin daripada untuk belanja yang produktif. Keadaan ini mencerminkan adanya fenomena ilusi fiscal, di mana peningkatan dana transfer tidak disertai dengan peningkatan mutu belanja pembangunan. Akibatnya, meskipun kemampuan fiscal daerah mengalami kenaikan, hal ini tidak secara efisiensi diubah menjadi belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kurang signifikannya peran belanja modal dalam model ini juga menunjukkan bahwa efektivitas dari belanja pemerintah daerah masih terhambat oleh masalah structural, seperti rendahnya kualitas perencanaan, keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran, serta kurangnya keterpaduan antara pengembangan infrastruktur dan kebutuhan sector ekonomi local.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Maheni et al., (2021) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang dimediasi oleh belanja modal. Namun, terhadap penelitian milik Sundoro et al., (2021), yang

menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang dimediasi oleh belanja modal.

Peran Belanja Modal dalam memediasi DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji sobel, menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu memediasi hubungan antara DAK terhadap PDRB dengan nilai Z sebesar $0,550277 < 1,96$ dan nilai pengaruh tidak langsung sebesar $0,054375$ lebih kecil dibanding pengaruh langsung $0,127$, sehingga menunjukkan bahwa DAK lebih dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

DAK seharusnya terhubung erat dengan belanja modal karena ditujukan untuk kegiatan fisik dan pengembangan infrastruktur. Namun, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAK belum berhasil memberikan output ekonomi yang berarti. Ini menunjukkan adanya jurang antara anggaran yang dialokasikan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Salah satu factor utama adalah sifat penggunaan DAK yang terlalu spesifik dan terpisah, sehingga pengaruhnya terhadap ekonomi daerah menjadi terbatas dan tidak menyeluruh. Proyek-proyek yang didanai melalui DAK seringkali berlangsung dalam skala kecil dan tidak langsung berfokus pada peningkatan produktivitas ekonomi local.

Tidak signifikan belanja modal terhadap PDRB juga mengindikasikan bahwa penggunaan yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat memberikan efek penggandam terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat pemanfaatan infrastruktur, kurangnya koneksi antara sector, serta dukungan yang belum maksimal untuk sector-sector unggulan di daerah.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Yudha et al., (2020) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang dimediasi oleh belanja modal. Namun, terhadap penelitian milik Maheni et al., (2021), yang menunjukkan bahwa DAK kurang dioptimalkan untuk berbagai aktivitas pada sector-sektor yang berkaitan pada pertumbuhan ekonomi.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan. Terhadap PDRB, PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan, sementara DAU dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, Belanja Modal tidak mampu memediasi pengaruh PAD, DAU, maupun DAK terhadap PDRB. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah variabel yang digunakan, periode penelitian yang relatif singkat, serta ketergantungan pada data sekunder. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti investasi, tenaga kerja, dan kemiskinan, memperpanjang periode serta memperluas wilayah penelitian, serta menggunakan metode analisis yang lebih kompleks agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

6. Daftar Pustaka

Abdillah, W. (2015). Mediating Effect of Capital Expenditure on the Effect of Revenues , Allocation Fund , and Tax / Nontax Sharing on Economic Growth (Empirical Study of Regencies in Bengkulu Province Period of 2009-2015). 2, 43–58.

- Adhim, M. A., Dewi, M. W., & Pravasanti, Y. A. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah , Belanja Daerah , Dan Pembiayaan Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB (Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Tahun 2016-2018) Sitasi Artikel : 3(2), 540–550.
- Aditya, J. R., Sudrajat, G. A., & Pringgodani, M. G. (2024). BELANJA MODAL DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS PADA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013-2022. 5, 160–179.
- Anandyaswara, B. (2024). ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2021. 8(7).
- Ardiyanti, R., & Jokolelono, E. (2016). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), dan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN / KOTA PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE TAHUN 2010-2016. 72–83.
- Asli, P., Pad, D., Dana, D. A. N., & Selatan, P. K. (2021). No Title. 34–47.
- Azaki, N., & Lutfi, A. (2023). Journal of Public Administration Studies Capital Grants For Local Infrastructure Provision In Perspective Of Allocative Efficiency: Evidence From Indonesia. 8(1), 1–9.
- Bruto, R., Kabupaten, P., Di, K., Jawa, P., & Oktafia, A. M. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PRODUK DOMESTIK. 2, 53–62.
- Chandra, H. A., & Badrudin, R. (2024). Nexus Between Capital Expenditure and Inclusive Economic Growth during the Covid-19 Pandemic. 6(2), 278–293.
- Dana, P., Umum, A., & Khusus, D. A. (n.d.). BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO.
- Devi, L. E., Sisharini, N., & Respati, H. (2024). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur. 8(2), 117–125.
- Dini, S., Br, E. A., Nava, M., & Siregar, A. (2021). PENGARUH PAD , DAU , DAK , DAN BELANJA MODAL TERHADAP. 4.
- Empiris, S., Kabupaten, P., Di, K., & Tengah, J. (2021). BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. 19(3), 141–152.
- Ghiffari, P. M., & Ariani, K. R. (2022). Procedia of Social Sciences and Humanities The Effect of LGR , Transfer Income , Capital Expenditures on Economic Growth Before and During Covid-19 Pandemic Pengaruh PAD , Pendapatan Transfer , Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan saat Pandemi Procedia of Social Sciences and Humanities. 0672(c), 232–241.
- Handayani, T., Susetyo, D., & Syirod, M. (2017). Pengaruh Belanja Modal , Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Selatan. 15(2), 92–100.
- Informasi, S., Dan, A., Dbh, P., Dak, D. A. N., Tingkat, T., Provinsi, K., & Selatan, S. (2024). THE INFLUENCE OF DBH , DAU , AND DAK ON THE LEVEL OF. 8(2), 168–182.
- Kota, K., Sumatera, D. I., & Tahun, B. (2019). No Title. 01(04), 8–26.
- Lawalata, S. Y. B. (2022). PENGARUH TINGKAT KONTRIBUSI PAD DAN DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMDA KABUPATEN MIMIKA. 7, 259–271.
- Maheni, M., Akuntansi, P. S., Stikubank, U., Umum, D. A., Khusus, D. A., Modal, B., Ekonomi, P., Daerah, P. A., & Umum, D. A. (2021). Proceeding SENDIU 2021. 978–979.

- Manik, R., Azwar, M. A., Andiny, P., Rizal, Y., & Langsa, U. S. (2025). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP. 2, 1–12.
- Meriana, D., & Subagio, B. S. (2025). Assessment for Evaluation of Local Roads Based on Infrastructure Data and Budget Allocation. 11(01), 44–57.
- Murti, A. F. R., Tan, S., Magister, P., Ekonomi, I., Ekonomi, F., & Jambi, U. (2023). Pengaruh PAD , DAU , DAK , dan Belanja Modal terhadap PDRB Dan Hubungannya dengan Kemiskinan di Kota Jambi. 18(2), 12–31.
- No Title. (2017). 19(02), 105–112.
- Novianti, F., Riani, W., & Mafruhah, A. Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Jawa Barat Periode 2011-2020. 273–281.
- Nurhemi, N., & R, G. S. (2015). Bulletin of Monetary Economics and Banking. 18(2).
- Pad, P., Terhadap, D. A. K., Ekonomi, P., Belanja, D., Sebagai, M., & Intervening, V. (2015). Jurnal Akuntansi <http://journal.unesa.ac.id/php/index/aj> PENGARUH PAD, DAU, DAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. 7(1), 1–17.
- Paper, W. (2018). WORKING PAPER MODEL.
- Pelealu, A. M., Dana, P., Khusus, A., Dana, P., Khusus, A., Pendapatan, D. A. N., & Daerah, A. (2012). No Title. 1(4), 1189–1197.
- Pembangunan, P., Jalan, I., Jembatan, D., Produk, T., Fauziah, D. R., Juliprijanto, D. W., & Si, M. (2021). Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM). 2(3), 304–315.
- Pendapatan, A., Daerah, A., Dana, D. A. N., Kabupaten, P., Di, K., Utara, S., Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Panggabean, F. Y., Prasetya, S. E., Pembangunan, U., & Budi, P. (2021). STIE Eka Prasetya 1234 , Universitas Pembangunan Panca Budi 5 *. 5(2), 212–225.
- Pendidikan, J. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 18(1), 72–88.
- Pertumbuhan, T., Melalui, E., Modal, B., & Kota, D. I. (2018). Universitas Brawijaya. 5(2).
- Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis pengaruh pad , dau , dak terhadap belanja modal Analysis of the effect of pad , dau , dak on district capital expenditures. 17(4), 653–660.
- Prayoga, R., & Pratama, K. A. (2025). Ekonomis : Journal of Economics and Business The Influence of Regional Expenditure on The Regional Economy in Regencies and Cities in Indonesia. 9(1), 691–702. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2344>
- Provinsi, D. I., & Selatan, K. (2017). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin (1) (3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2). 7(1), 111–122.
- Provinsi, D., Pulau, D. I., Tahun, S., Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., & Oktavia, E. (2021). No Title. VII(1), 44–53.
- Pujiati, H. (2018). ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2017). 7, 80–93.

- Putri, I. L. (2024). Realisasi Anggaran Belanja Modal terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sambas. 2(1), 32–44. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v2i1.387>
- Rajab, A. (2023). Volume 25 Issue 2 (2023) Pages 280-289 FORUM EKONOMI : Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Akuntansi ISSN : 1411-1713 (Print) 2528-150X (Online) Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat PDRB Provinsi Sulawesi Barat The influence of capital expenditures and regional original income on GRDP level of West Sulawesi Province. 25(2), 280–289.
- Risman, D., Ama, T., Studi, P., Pembangunan, E., Kristen, U., Wacana, W., Timur, S., R-square, U., & Modal, B. (2022). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap PDRB Kabupaten di Pulau Sumba Tahun 2015 - 2020. XI(34), 30–42.
- Rosadian, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.
- Saputra, K. W. (2024). Jurnal Bedah Hukum KEWENANGAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Kasus Gugatan Atas Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Padang – Sicincin) Jurnal Bedah Hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8(1), 83–92.
- Sari, Y., Murwiati, A., & Sitorus, N. H. (2024). Economics and Digital Business Review Analisis Teori Pertumbuhan Endogen pada Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera tahun 2020-2022. 5(2), 876–884.
- Savira, F., Fatimah, S., Asli, P., & Modal, B. (2020). PENGARUH PAD , BELANJA MODAL DAN TPAK TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI NTB. 77–99.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun Oleh : 2(1), 40–48.
- Sumatra, N., Government, S. R., Revenue, T., & Expenditure, C. (2025). Jurnal Aplikasi Akuntansi PERFORMANCE : THE IMPACT OF LOCAL OWN REVENUE ,. 10(1), 283–300. <https://doi.org/10.29303/jaa.v10i1.702>
- Susanto, E., Gunawan, A., Tampubolon, O. F., & Tampubolon, D. (2025). Regional Fiscal Dynamics : The Influence of Local Revenue and Transfer Receipts on Capital Expenditure. 9(2), 150–161.
- Susianti, O. M. (2024). Perumusan Variabel Dan Indikator Dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan. 9, 18–30.
- Syahrani, D., Sugara, W. H., Aulia, J., Yani, T., Kemala, P., & Lubis, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB di Sumatera Utara. 4(3), 4925–4938.
- Teologi, J., & Agama, P. (2025). Model Analisis Jalur (Path Analysis): Penelitian Teologi Terapan Kausalitas Kuantitatif maupun melalui variable mediasi . September. Terhadap, P., & Ekonomi, P. (2024). Jdess 03.04.2024. 3(4), 1115–1125.
- Terindeks, T., Ristek, S., Tahun, D., Susanti, E., Fitrika, C., Ismaida, N., Efektivitas, A., Efisiensi, D. A. N., & Tahun, I. A. (2021). JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH. 11(3).
- Uhise, S., Alokasi, D., Dau, U., Alokasi, D., Dau, U., Terhadap, P., & Ekonomi, P. (2012). No Title. 1(4), 1677–1686.

- Unud, E. M. (2018). PENGARUH PAD , DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia
- Utomo, L. P., Asyik, N. F., Hermanto, S. B., & Timur, J. (2015). BELANJA MODAL
MEMEDIASI PENGARUH PENDAPATAN REVENUES ON ECONOMIC
GROWTHSPECIAL. 115-128.
- Zulkifli, A., Gusniati, J., Zulefni, M. S., & Afendi, R. A. (2025). dengan Tutorial uji
normalitas dan menggunakan aplikasi SPSS uji homogenitas. 1(2), 55-68.